



Efektivitas Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Masal di Bawah Naungan Kementerian Agama dalam Menjawab Kebutuhan Guru Profesional

Khotibul Umam^{1*}, Muhaiminah Darajat², Muhammad Yusuf Arwiarto³, Andi Patta Yusuf⁴, Ainur Alam Budi Utomo⁵

¹ Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Indonesia

² Universitas Islam Syarifuddin Lumajang Jawa Timur, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

⁴ Universitas Musamus Merauke Indonesia, Indonesia

⁵ Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: santri.p5m@gmail.com¹, mimin.darajat@gmail.com², yusufray091@gmail.com³, pattayusuf@unmus.ac.id⁴, ainuralambudiutomo@ubpkarawang.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: santri.p5m@gmail.com

Abstract. *The Mass Teacher Professional Education Program (PPG) under the Ministry of Religious Affairs is designed to enhance teacher professionalism, particularly for Islamic Education teachers and madrasah educators. Despite its large-scale implementation, the program's effectiveness in addressing professional teacher needs remains a critical issue, considering disparities in teacher competencies, participant readiness, variations in program quality, and digital literacy limitations across regions. This study aims to evaluate the effectiveness of the Mass PPG in improving pedagogical, professional, social, and personal competencies of teachers, as well as to assess its relevance to the demands of professional practice in real educational settings. The study employs a descriptive qualitative approach, using data from PPG participants, program administrators, and official documentation. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, then thematically analyzed to assess program effectiveness, challenges, and relevance. Results indicate that the Mass PPG improves teacher competencies and broadens access to professional development; however, its effectiveness is influenced by participant readiness, program quality variation, participant motivation, and digital literacy. In conclusion, the Mass PPG is effective when complemented by differentiated strategies based on competency assessment, enhanced digital literacy, and integration with the teacher career system.*

Keywords: Effectiveness; Ministry Religion; Participant Observation; Professional Teachers; Teacher Professional Education.

Abstrak. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Masal di bawah naungan Kementerian Agama dirancang untuk meningkatkan profesionalisme guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam dan guru madrasah. Meskipun telah dilaksanakan secara masif, efektivitas program dalam menjawab kebutuhan guru profesional masih menjadi isu penting, mengingat disparitas kompetensi guru, kesiapan peserta, variasi kualitas penyelenggaraan, serta keterbatasan literasi digital di beberapa wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas PPG Masal dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru, serta menilai sejauh mana program ini relevan dengan tuntutan profesionalisme di dunia pendidikan nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data meliputi guru peserta PPG, pengelola program, dan dokumen resmi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara tematik untuk menilai tingkat efektivitas, tantangan, dan relevansi program. Hasil penelitian menunjukkan PPG Masal berhasil meningkatkan kompetensi guru dan memperluas akses pelatihan, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh kesiapan peserta, variasi kualitas pelaksanaan, motivasi peserta, dan keterbatasan literasi digital. Kesimpulannya, PPG Masal efektif jika disertai strategi diferensial berbasis asesmen kompetensi awal, peningkatan literasi digital, dan integrasi dengan sistem karier guru.

Kata Kunci : Efektifitas; Guru Profesional; Kementerian Agama; Observasi Partisipatif; Pendidikan Profesi Guru.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan kebijakan strategis pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk memperkuat kompetensi guru melalui standar profesi yang diakui secara nasional, serta sebagai syarat utama pengangkatan dalam struktur kepegawaian formal (Pemerintah RI, 2005). Program ini dirintis sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meminimalisasi disparitas kualitas guru di berbagai jenjang pendidikan serta untuk menyiapkan tenaga pendidik yang profesional, berdaya saing, dan responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman. Dalam konteks Kementerian Agama, PPG menjadi instrumen penting bagi peningkatan kapasitas guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) serta pendidik di madrasah, di mana profesionalisme pendidik bukan sekadar menjadi harapan normatif, tetapi menjadi kebutuhan riil dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan pendidikan Islam yang berintegritas (RISTEKDIKTI, 2017). Kebijakan pelaksanaan PPG secara massal (“PPG Masal”) menunjukkan intensi kuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru profesional secara masif, mencakup ratusan hingga puluhan ribu peserta setiap tahunnya, sebagai respons terhadap kebutuhan dunia pendidikan yang terus berkembang.

Pelaksanaan PPG Masal di bawah Kementerian Agama dilatarbelakangi oleh berbagai indikator kebutuhan tenaga pendidik profesional: ketimpangan kompetensi guru antar daerah, tuntutan standar nasional pendidikan, serta meningkatnya kompleksitas peran guru dalam menghadapi pembelajaran abad ke-21 (Kinanthi et al., 2024). Praktik pelaksanaan PPG yang masif memperlihatkan perubahan paradigma dari mekanisme selektif dan terbatas menjadi mekanisme inklusif dan berbasis kuota besar, yang bertujuan memperluas akses peserta didik PPG dari seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, pada Batch 4 tahun 2026, Kementerian Agama membuka lebih dari 98.000 kuota peserta PPG untuk guru madrasah dan guru Pendidikan Agama Islam secara nasional sebagai bagian dari agenda strategis pemerataan kompetensi dan kualifikasi pendidikan (Kementerian Agama RI, 2026). Langkah ini sekaligus merefleksikan perhatian publik terhadap peran guru sebagai ujung tombak pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional.

Terlepas dari intensitas dan skala pelaksanaannya, muncul pertanyaan terhadap efektivitas program PPG Masal sebagai solusi terhadap kebutuhan guru profesional secara komprehensif. Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana pelaksanaan program dapat meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru secara riil; bagaimana relevansi pencapaian kompetensi tersebut terhadap tantangan tugas guru di dunia pendidikan; serta sejauh mana tantangan pelaksanaan program memengaruhi hasil yang

diharapkan. Permasalahan ini penting, karena guru yang profesional tidak hanya sekadar memiliki sertifikasi atau kualifikasi formal, tetapi juga harus menunjukkan kemampuan yang kontekstual dalam merancang pembelajaran yang efektif, menilai hasil belajar siswa secara tepat, serta beradaptasi dengan dinamika sistem pendidikan modern (RISTEKDIKTI, 2017).

Kajian literatur sebelumnya memberikan gambaran bahwa program PPG memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi guru, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks pelaksanaan, kesiapan peserta, model pembelajaran, serta dukungan institusional. Dwikurnaningsih dan rekan mengkaji efektivitas PPG berbasis pembelajaran online dan menyimpulkan bahwa program tersebut efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan hasil kerja peserta, meskipun masih diperlukan optimalisasi sesi tatap muka untuk menjawab tantangan praktikal di lapangan (Sridadi et al., 2023). Studi implementasi PPG Pendidikan Agama Islam yang dilakukan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa meskipun pelaksanaan program relatif baik, ada kendala yang signifikan dari karakter latar belakang peserta yang beragam dan tantangan fokus pembelajaran karena guru masih berstatus aktif mengajar selama PPG berlangsung (Fisip Unpar, 2015). Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas program tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas konten pembelajaran, tetapi juga oleh konteks kerja guru dan kemampuan peserta untuk mengalokasikan waktu belajar secara optimal.

Penelitian lain oleh Nur Diniyya dan rekan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa PPG berkontribusi pada peningkatan profesionalisme guru, namun faktor administratif dan kendala teknologi menjadi hambatan penting dalam pelaksanaan program (Yasinta Qur'aini Nurdiniyya¹, 2025). Sementara itu, Samsu et al. mengevaluasi pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS) dalam PPG dan menemukan bahwa penggunaan LMS memberikan dampak positif terhadap kompetensi guru madrasah, meskipun masih terdapat kesenjangan akses teknologi dan kesiapan belajar mandiri di berbagai daerah (SamsuSyahbani et al., 2026). Analisis sistematis oleh Wahyudin dan Aripin juga menegaskan bahwa PPG berkontribusi positif terhadap kompetensi guru secara umum, tetapi kualitas pelaksanaan, kesiapan institusional penyelenggara, serta motivasi peserta menjadi variabel penting yang menentukan berhasil atau tidaknya program tersebut (SamsuSyahbani et al., 2026).

Dari kajian terdahulu di atas, terlihat bahwa mayoritas penelitian fokus pada model pembelajaran, manajemen program, atau aspek kompetensi tertentu secara parsial. Namun, belum ada kajian komprehensif yang mengevaluasi efektivitas PPG Masal secara holistik di bawah Kementerian Agama, yang sekaligus menautkan hasil program dengan kebutuhan guru profesional dalam konteks dunia pendidikan yang sebenarnya. Kebaruan penelitian ini terletak

pada fokusnya yang secara spesifik mengevaluasi PPG Masal sebagai respons kebijakan publik terhadap kebutuhan guru profesional secara masif, serta menggunakan pendekatan holistik yang mencakup seluruh dimensi kompetensi yang diwajibkan dalam kurikulum PPG: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Pendidikan Profesi Guru No. 19 2024, 2024).

Selain itu, penelitian ini juga dirancang untuk mengevaluasi relevansi hasil program dengan kebutuhan tugas guru di sekolah, bukan sekadar melihat hasil ujian atau sertifikasi formal semata. Aspek tersebut sering kali tidak menjadi fokus utama dalam kajian evaluasi sebelumnya, meskipun menjadi isu sentral dalam wacana profesionalisme guru. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengisi celah akademik dalam kajian evaluasi program guru, tetapi juga memberikan kontribusi empiris bagi pembuat kebijakan, lembaga penyelenggara pendidikan profesi, dan komunitas pendidik di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan baik dalam konteks akademik maupun kebijakan publik. Secara akademik, hasil penelitian akan memperkaya literatur evaluasi pendidikan profesi guru di Indonesia dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual, serta membuka peluang kajian lanjutan yang lebih mendalam terhadap model evaluasi program guru profesional. Secara kebijakan, penelitian ini dapat menjadi basis rekomendasi bagi Kementerian Agama dan lembaga pendidikan terkait dalam merancang dan mengimplementasikan program PPG yang lebih responsif terhadap kebutuhan profesionalisme guru, lebih adaptif terhadap kondisi kerja guru di berbagai wilayah, serta lebih efektif dalam menghasilkan guru yang siap menghadapi tantangan pendidikan kontemporer.

Temuan dari kajian ini juga dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi pembelajaran dan asesmen yang lebih efektif dalam PPG, termasuk integrasi model blended learning yang menggabungkan keunggulan pembelajaran online dan tatap muka, pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis konteks lokal sekolah, serta penyusunan mekanisme mentoring yang mendukung transisi kompetensi ke praktik pembelajaran nyata di sekolah. Dengan demikian, dampak penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemahaman teoretis semata, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui penguatan peran guru sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang efektivitas PPG Masal sebagai jawaban kebijakan terhadap kebutuhan guru profesional, dengan pendekatan empiris yang holistik dan kontekstual. Upaya ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam memahami kualitas dan relevansi pelaksanaan PPG Masal, serta menjadi pijakan kuat bagi perumusan kebijakan strategis yang lebih efektif untuk masa depan

pendidikan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam efektivitas Program PPG Masal di bawah Kementerian Agama. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini bukan sekadar mengukur angka atau skor kompetensi, tetapi untuk mengeksplorasi pengalaman guru, tantangan pelaksanaan, dan relevansi hasil PPG terhadap kebutuhan profesionalisme guru di sekolah (Weyant, 2022). Sumber data penelitian terdiri dari guru yang mengikuti program PPG Masal, pengelola PPG di Kementerian Agama, serta dokumen resmi terkait pelaksanaan PPG, seperti pedoman program, laporan evaluasi, dan modul pembelajaran (Kemenag, 2025).. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi dokumen yang relevan dengan indikator keberhasilan program PPG, termasuk pencapaian kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru (Moleong, 2019). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi kontekstual yang lengkap mengenai efektivitas program dari perspektif peserta dan penyelenggara sekaligus meminimalkan bias sekunder.

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan tahap awal pengkodean data berdasarkan indikator kompetensi guru yang ditetapkan dalam standar PPG, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi temuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, tantangan, dan relevansi program (Miles, M. B., Huberman, A. M., 2018). Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan konsep profesionalisme guru dan kebijakan PPG Kementerian Agama, membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara pelaksanaan PPG Masal, peningkatan kompetensi guru, dan pemenuhan kebutuhan guru profesional di sekolah. Kerangka konseptual ini menegaskan bahwa efektivitas program PPG Masal bergantung pada kesiapan peserta, kualitas pembelajaran, manajemen program, serta dukungan institusional, sehingga keberhasilan pelatihan profesional tidak hanya ditentukan oleh konten akademik tetapi juga konteks implementasinya di lapangan (Darling-Hammond, 2017). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh dan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan program PPG selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru Profesional dalam Menjawab Tentangan Kemajuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sebagai salah satu pilar pendidikan nasional Indonesia menghadapi kompleksitas tantangan yang semakin luas dan dinamis baik internal maupun eksternal dalam

era globalisasi dan revolusi teknologi. Tradisionalitas sistem pembelajaran agama, tuntutan perubahan kurikulum, perluasan peran sosial-kultural guru, serta tekanan kompetitif pada kualitas pendidikan menuntut respon yang bukan sekadar normatif tetapi berbasis kompetensi profesional yang tinggi. Dalam konteks ini, guru profesional menjadi ujung tombak perubahan, sebagai agen transformasi yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk kompetensi murid, membangun karakter, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang relevan dengan realitas kontemporer. Oleh karena itu, pembahasan mengenai guru profesional dalam menjawab tantangan kemajuan pendidikan Islam bukan sekadar pembahasan teknis peran guru, tetapi sebuah kajian strategis mengenai relevansi profesionalisme pendidikan Islam dalam tatanan sosial pendidikan modern.

Konsep guru profesional dalam ranah pendidikan modern telah berkembang dari paradigma “instruktur tradisional” menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu mengadaptasi pengetahuan terhadap konteks zaman. Profesionalisme guru tidak diukur semata oleh kualifikasi akademik atau sertifikasi formal, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, penguasaan materi ajar lintas disiplin, keterampilan pedagogik reflektif, serta kemampuan sosial untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan konteks kehidupan murid dan masyarakat luas (Darling-Hammond, 2017). Tantangan ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam yang harus menjaga keseimbangan antara tradisi keilmuan Islam yang mendalam dan kebutuhan pembelajaran modern yang kontekstual, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru profesional dalam pendidikan Islam harus memiliki kapasitas ganda: menjadi pengawal tradisi ilmu agama sekaligus fasilitator perkembangan ilmu pengetahuan umum yang relevan bagi murid Muslim di abad ke-21.

Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: bagaimana guru profesional Islam menjawab tantangan kemajuan pendidikan Islam yang bersifat multidimensional teknologis, epistemologis, sosial, dan kultural tanpa kehilangan esensi nilai moral dan spiritual? Jawabannya terletak pada paradigma profesionalisme yang tidak sekadar prosedural tetapi bersifat kontekstual dan transformatif. Guru profesional harus mampu merumuskan pendekatan pedagogik yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial, termasuk kemampuan teknologi pendidikan, penilaian autentik, serta pemahaman lintas budaya dan agama. Di sinilah letak perbedaan antara “guru sebagai pengajar” dan “guru sebagai pembelajar”; yang terakhir merupakan aktor pendidikan yang terus menerus memperbarui

kompetensinya sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik (L. S. Shulman, 2019).

Tantangan pertama pendidikan Islam modern adalah integrasi nilai tradisional dengan dinamika pembelajaran kontemporer. Sistem pendidikan Islam tradisional sering kali menekankan hafalan teks teks klasik, seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, dan ilmu nahwu tanpa mengaitkannya dengan konteks aplikasi kehidupan modern. Hal ini menjadi kurang relevan bagi generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi, media digital, dan perubahan sosial yang cepat. Guru profesional harus mampu mengintegrasikan kedua dimensi ini: mempertahankan kedalaman nilai Islam tradisional sekaligus menghubungkannya dengan kontekstualisasi masalah kontemporer misalnya etika teknologi, pluralisme sosial, dan tantangan moral di ruang digital (Arroyan, 2024).

Selain itu, kemajuan pendidikan Islam menuntut kompetensi pedagogik yang lebih adaptif dan reflektif. Guru profesional tidak cukup hanya memiliki pengetahuan teoretis; mereka harus memiliki teknik mengajar yang beragam, seperti pembelajaran berbasis masalah, kolaboratif, evaluasi autentik, dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan pedagogik ini memungkinkan murid tidak hanya memahami materi ajar tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab moral. Pendekatan semacam ini menuntut guru untuk mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat, menggunakan media teknologi yang relevan, serta mengevaluasi hasil belajar berdasarkan kompetensi nyata yang dibangun dalam lingkungan pembelajaran Islam (Brown, 2001).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah teknologi pendidikan dan literasi digital. Revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap pendidikan secara fundamental. Teknologi bukan lagi sekadar alat tambahan, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran efektif. Guru profesional pendidikan Islam harus memiliki kemampuan literasi digital yang tinggi untuk memaksimalkan pembelajaran daring dan luring secara terintegrasi. Kompetensi ini meliputi kemampuan memanfaatkan platform pembelajaran digital, membuat bahan ajar multimedia, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkaya pemahaman nilai-nilai Islam, bukan sekadar mengulang cara pengajaran tradisional secara digital (Neil Selwyn, 2021). Tantangan ini semakin tajam ketika pendidikan Islam harus bersaing dengan konten digital yang kurang mendidik atau bertentangan dengan nilai moral Islam; guru profesional harus menjadi kurator konten digital yang mampu menyeleksi, menyaring, dan mengintegrasikan informasi yang mendukung tujuan pendidikan Islam.

Selain teknis pedagogik dan teknologi, dimensi sosial-kultural juga menjadi tantangan kritis. Pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial di mana murid tumbuh: keluarga, masyarakat, budaya lokal, dan dinamika sosial yang terus berkembang. Guru profesional harus memiliki kompetensi sosial-emosional yang kuat untuk memahami karakter murid yang beragam serta mampu menyampaikan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan mereka. Kemampuan ini mencakup empati, komunikasi efektif, keterampilan mediasi konflik, dan pemahaman tentang isu-isu sosial mutakhir misalnya toleransi, keadilan sosial, serta tanggung jawab lingkungan. Tanpa kompetensi sosial semacam ini, guru hanya akan menjadi penyampai informasi yang sekedar tekstual, bukan agen perubahan yang membantu murid menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata (Goleman, 1995).

Melampaui aspek pedagogik, teknologi, dan sosial-kultural, seorang guru profesional juga menghadapi tantangan epistemologis: yaitu cara memperoleh, mengembangkan, dan menyampaikan ilmu pengetahuan Islam secara relevan dengan perkembangan keilmuan umum. Pendidikan Islam sering dikritik karena kurang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer misalnya sains, etika teknologi, dan ilmu sosial baru. Jika guru profesional Islam gagal menjembatani perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum, pendidikan Islam berisiko menjadi marginal, kurang relevan, dan tidak mampu menjawab kebutuhan generasi muda dalam memahami masalah kompleks modern. Guru profesional harus memegang posisi sebagai *interpreter* (penafsir) ilmu yang mampu menyatukan tradisi dan modernitas tanpa kehilangan esensi fundamental agama Islam (Nasr, 1976).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru Islam siap menghadapi tantangan ini. Banyak guru memiliki kualifikasi akademik yang baik dalam ilmu agama tetapi kurang siap dalam pedagogik modern dan literasi teknologi. Sebaliknya, ada pula guru yang melek teknologi tetapi kurang mendalam dalam penguasaan materi Islam yang menjadi inti pendidikan itu sendiri. Ketidakseimbangan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan sistem pelatihan guru yang lebih holistik, seperti PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang dirancang untuk memperkuat kompetensi pedagogik, profesional, sosial, teknologi, dan etika secara serempak (Kemenag, 2025).

Oleh karena itu, solusi yang tepat bukan hanya meningkatkan kuantitas guru profesional tetapi juga meningkatkan kualitas profesionalisme secara sistemik. Sistem pendidikan Islam harus mengadopsi model pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*), termasuk workshop, kursus online, mentoring, dan komunitas praktik guru yang saling berbagi inovasi pembelajaran. Model ini menggarisbawahi bahwa profesionalisme

bukan tujuan akhir tetapi suatu proses dinamis yang terus berkembang sesuai perubahan sosial dan tuntutan pendidikan (Opfer & Pedder, 2011).

Kesimpulannya, tantangan kemajuan pendidikan Islam yang melintas berbagai dimensi memerlukan respon guru profesional yang tidak hanya kompeten dalam aspek akademik, tetapi juga adaptif dalam pedagogik, berintegritas dalam etika, kreatif dalam pemanfaatan teknologi, serta sensitif terhadap konteks sosial murid. Guru profesional adalah *agent of change*: sang fasilitator nilai yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas, nilai agama dan ilmu pengetahuan, serta memastikan bahwa pendidikan Islam menjadi sarana pembentukan individu Muslim yang matang secara intelektual, spiritual, dan sosial. Profesionalisme guru bukan hanya sebuah jargon; ia adalah syarat mutlak agar pendidikan Islam mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam era tantangan global. Pendidikan Islam yang maju bukan sekadar milik masa depan, tetapi sekarang melalui guru-guru profesional yang siap mengartikulasikan nilai tradisional ke dalam praktik pembelajaran kontemporer yang relevan, transformatif, dan bermakna.

Porgaram Profesi Guru (PPG) dan Skema Perekrutannya

Program Profesi Guru (PPG) merupakan salah satu kebijakan pendidikan yang menjadi pilar dalam upaya memperkuat kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya dimaknai sebagai serangkaian kegiatan pendidikan formal untuk mendapatkan sertifikasi, tetapi sebagai bagian integral dari sistem peningkatan kualitas profesionalisme guru secara menyeluruh. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan nasional, guru diakui sebagai faktor penentu utama keberhasilan proses pembelajaran, maka PPG dirancang untuk menjawab ketidakcukupan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang selama ini menjadi kelemahan struktural dalam sistem pendidikan nasional (Pemerintah RI, 2005). Dengan demikian, PPG bukan sekadar sertifikasi formal atau prosedural administratif; ia merupakan instrumen strategis dalam membentuk guru yang mampu menghadapi kompleksitas kurikulum, dinamika peserta didik, serta tuntutan perubahan sosial dan teknologi.

Pendirian PPG secara sistematis dimulai setelah diamanatkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi profesi sebagai syarat utama dalam pelaksanaan tugas profesional (RISTEKDIKTI, 2017). Tujuan utama PPG adalah memastikan bahwa setiap guru memiliki kompetensi yang diukur melalui standar profesional yang baku dan konsisten, sehingga pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas tidak hanya menjadikan guru sebagai pengajar pasif, tetapi sebagai fasilitator yang berpikir

kritis, mampu merancang proses pembelajaran yang efektif, mengevaluasi hasil belajar secara objektif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, PPG menjadi alat kebijakan yang berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara sistemik, sekaligus upaya untuk menutup kesenjangan kualitas guru di berbagai daerah yang selama ini menjadi masalah klasik pendidikan Indonesia (Darling-Hammond, 2017).

Namun, di luar wacana idealisme tersebut, realitas pelaksanaan PPG menunjukkan adanya berbagai tantangan substantif terkait efektivitas, relevansi materi pembelajaran, serta mekanisme perekrutan peserta yang masih dipenuhi perdebatan akademik dan kebijakan publik. Skema perekrutan PPG sering kali dianggap lebih bersifat administratif dan kuantitatif dibandingkan kualitatif, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah mekanisme perekrutan PPG selama ini mampu menjaring guru yang benar-benar membutuhkan peningkatan kompetensi profesi, ataukah justru sekadar formalitas administratif yang meredefinisi kualitas tanpa esensi perubahan riil dalam praktik pembelajaran di kelas?

Skema perekrutan PPG di Indonesia dirancang melalui beberapa jalur, yang paling umum adalah jalur reguler dan jalur khusus. Jalur reguler umumnya terbuka bagi guru yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau setara dan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti program. Syarat tersebut meliputi masa kerja minimum, sertifikasi pendahuluan (misalnya pendidikan awal profesi atau pengalaman mengajar tertentu), serta rekomendasi dari unit kerja pendidikan masing-masing (RISTEKDIKTI, 2017). Sedangkan jalur khusus diberikan kepada guru yang berada di bidang keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh sistem pendidikan, seperti pendidikan agama, bahasa, atau bidang vokasional tertentu, yang mungkin memiliki kekurangan jumlah tenaga profesionalnya (RISTEKDIKTI, 2017).

Masalah timbul ketika pertimbangan perekrutan lebih didominasi oleh kuota layanan atau kebutuhan administratif ketimbang evaluasi kebutuhan riil kompetensi di lapangan. Misalnya dalam kondisi tertentu, guru yang secara statistik memenuhi persyaratan administratif tetap terdaftar dalam skema PPG, padahal kompetensi pedagogik atau penggunaan teknologi pembelajarannya sangat rendah, sehingga kemampuan profesionalnya untuk menerjemahkan pembelajaran modern menjadi sesuatu yang kurang efekti (Darling-Hammond & McCloskey, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa skema perekrutan belum sepenuhnya berbasis pada asesmen kompetensi awal yang memadai yang seharusnya menjadi parameter fundamental untuk menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan pelatihan

profesional. PPG justru sering kali menjadi “hak administratif” daripada “kebutuhan profesional”.

Untuk menjawab persoalan tersebut, beberapa implementasi PPG memperkenalkan pre-assessment kompetensi sebagai bagian dari seleksi awal. Pre-assessment ini bertujuan untuk menilai tingkat kompetensi awal calon peserta dalam empat domain utama: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, sehingga yang ditetapkan untuk mengikuti pelatihan adalah mereka yang secara objektif menunjukkan kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan (Darling-Hammond & McCloskey, 2008). Namun, pelaksanaan pre-assessment masih menghadapi kendala teknis, seperti standar asesmen yang belum konsisten antar lembaga penyelenggara, variasi kualitas instrumen asesmen, serta rendahnya pemahaman calon peserta tentang teknik asesmen itu sendiri. Akibatnya, hasil pre-assessment terkadang kurang menjadi dasar yang kuat untuk menentukan kelayakan peserta, sehingga efektivitas PPG sebagai alat peningkatan kompetensi tetap dipertanyakan.

Lebih jauh, skema perekrutan PPG juga dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan strategis pendidikan. Misalnya, pemerintah pernah menetapkan program PPG masal sebagai jawaban atas kebutuhan percepatan standarisasi kompetensi guru di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal atau daerah dengan kualitas pendidikan rendah (Kementerian Agama RI, 2026). Pada implementasinya, PPG masal diikuti oleh puluhan ribu guru yang dipilih melalui skema administratif berdasarkan status kepegawaian, masa kerja, atau pemetaan kebutuhan guru di daerah tertentu. Skema perekrutan semacam ini berdampak pada distribusi peserta PPG yang lebih merata, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang apakah pendekatan kuantitatif semacam itu efektif dalam menjamin kualitas kompetensi yang dihasilkan, dibandingkan pendekatan perekrutan berbasis kebutuhan kompetensi individu secara spesifik.

Selain itu, skema perekrutan juga berkaitan erat dengan insentif materiil yang menyertainya, seperti kenaikan tunjangan profesi, prioritas pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu, atau peluang mendapatkan fasilitas karier lebih lanjut. Insentif ini berpotensi mempengaruhi motivasi calon peserta untuk mengikuti PPG bukan semata karena kebutuhan peningkatan kompetensi, melainkan karena insentif administratif yang menyertainya. Motivasi semacam ini dapat menghasilkan efek crowding out terhadap motivasi intrinsik profesionalisme, karena pelatihan profesional dipersepsikan sebagai jalan pintas administratif untuk memperoleh insentif atau tunjangan, bukan sebagai proses pembelajaran profesional yang serius (Deci et al., 2001). Fenomena ini dapat berdampak negatif pada kualitas

hasil PPG, karena peserta lebih fokus pada kelulusan dan sertifikasi daripada benar-benar meningkatkan kompetensi pembelajaran mereka.

Kontroversi lain dalam skema perekrutan PPG berkaitan dengan kesenjangan akses dan kesempatan antar wilayah dan kelompok guru. Guru di daerah perkotaan yang memiliki jaringan profesional yang kuat dan akses informasi yang baik cenderung lebih mudah mengikuti skema perekrutan PPG, sedangkan guru di daerah terpencil sering kali mengalami keterbatasan informasi, persyaratan teknis pendaftaran, atau fasilitas asesmen awal yang memadai (UNESCO, 2018). Situasi ini menciptakan ketidaksetaraan kesempatan dalam memperoleh akses pelatihan profesional yang seharusnya bersifat universal. Ketimpangan semacam ini ironisnya justru memperkuat disparitas kompetensi guru antar wilayah, yang semestinya menjadi salah satu alasan utama diadakannya program PPG secara masal.

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, perlu dikembangkan skema perekrutan PPG yang lebih berbasis kebutuhan kompetensi, bukan semata administratif. Artinya, calon peserta PPG tidak hanya lolos karena memenuhi kriteria administratif, tetapi karena telah melewati penilaian kebutuhan riil kompetensi melalui asesmen awal yang valid dan reliabel. Jika asesmen awal tersebut dapat dijadikan dasar, maka pelatihan dapat dirancang secara diferensial misalnya melalui modul pembelajaran yang menargetkan kelemahan kompetensi tertentu pada tiap peserta sehingga efektivitas PPG dalam meningkatkan kompetensi profesional menjadi lebih tinggi (L. Shulman, 1986).

Pendekatan diferensial semacam ini juga memungkinkan penyusunan jalur perekrutan berbasis spesialisasi, di mana guru yang memiliki kompetensi dasar yang kuat dapat ditempatkan pada jalur pelatihan lanjutan atau pengembangan keahlian spesifik, sementara guru yang memang membutuhkan penguatan kompetensi dasar diarahkan ke modul pembelajaran yang relevan dengan kekurangan mereka. Pendekatan semacam ini tentu lebih mahal secara sumber daya, namun secara jangka panjang akan menghasilkan tenaga pendidik yang benar-benar kompeten dalam domain profesinya dibandingkan pendekatan satu ukuran untuk semua yang dominan terjadi selama ini.

Tidak kalah penting adalah perbaikan integrasi antara kebijakan perekrutan PPG dengan sistem karier guru yang lebih luas termasuk sistem remunerasi, promosi jabatan, dan penempatan tugas. Kebijakan yang memberi insentif yang lebih besar kepada guru yang benar-benar menunjukkan peningkatan kompetensi melalui evaluasi praktik nyata akan lebih efektif dibandingkan sistem yang memberi insentif semata karena kelulusan administratif dari

pelatihan profesional (“Improv. Sch. Leadersh.,” 2010). Dengan demikian, PPG tidak hanya menjadi ritual administratif tetapi menjadi bagian sistem karier profesional yang terintegrasi.

Dalam kesimpulannya, Program Profesi Guru (PPG) memiliki potensi besar sebagai mesin transformasi kualitas pendidikan di Indonesia jika skema perekrutannya dirancang secara tepat, objektif, dan berbasis kebutuhan kompetensi. Skema perekrutan yang masih terlalu administratif dan kuantitatif berisiko menghasilkan guru yang bersertifikasi tetapi tidak kompeten secara profesional, yang pada akhirnya tidak akan mampu menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21. Skema perekrutan yang lebih berbasis asesmen kompetensi awal, diferensial dalam materi pelatihan, dan terintegrasi dengan sistem karier yang efektif merupakan jalan strategis untuk memastikan bahwa PPG tidak hanya menghasilkan sertifikat, tetapi menghasilkan guru profesional yang mampu mentransformasikan pendidikan secara nyata dan berkelanjutan.

Efektifitas Program Profesi Guru di Bawah Naungan Kementerian Agama dalam Menjawab Kebutuhan Guru Profesional

Program Profesi Guru (PPG) yang dikelola di bawah Kementerian Agama (Kemenag) merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini tidak hanya dimaknai sebagai sarana sertifikasi formal, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk meningkatkan profesionalisme guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru madrasah. Profesionalisme guru sendiri mencakup penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang terintegrasi dalam praktik pembelajaran di kelas (Pemerintah RI, 2005). Dalam konteks pendidikan Islam, guru profesional diharapkan mampu mentransfer ilmu, menanamkan nilai moral dan spiritual, serta mengadaptasi metode pembelajaran yang relevan dengan tuntutan abad ke-21. Dengan demikian, efektivitas PPG tidak dapat diukur semata dari jumlah guru yang tersertifikasi, tetapi dari sejauh mana program tersebut berhasil menyiapkan guru yang mampu memenuhi tuntutan profesionalisme dalam praktik nyata pembelajaran (RISTEKDIKTI, 2017).

Efektivitas PPG Kemenag menjadi relevan ketika dikaitkan dengan tantangan sistem pendidikan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah disparitas kompetensi guru antar wilayah. Guru di perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pelatihan, teknologi, dan fasilitas pendidikan dibanding guru di daerah tertinggal. Hal ini menyebabkan ketimpangan kemampuan guru dalam menerapkan standar pendidikan profesional secara merata (RISTEKDIKTI, 2017). Program PPG Masal yang diselenggarakan Kemenag dimaksudkan untuk menekan ketimpangan tersebut dengan membuka kuota besar bagi guru di

seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal. Namun, pelaksanaan program ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah jumlah peserta yang besar menjamin peningkatan kualitas kompetensi guru secara nyata, ataukah hanya menjadi alat administratif untuk memenuhi kuota formal? (RISTEKDIKTI, 2017).

Selain itu, tantangan kedua adalah kesiapan peserta mengikuti program. Beberapa guru yang terdaftar dalam PPG memiliki latar belakang kompetensi yang beragam, dan banyak di antaranya masih mengajar aktif saat mengikuti program (Yari Dwikurnaningsih¹ et al., 2025). Situasi ini menimbulkan konflik waktu dan mengurangi fokus peserta dalam menyerap materi pelatihan. Keterbatasan kesiapan ini menyoroti perlunya strategi diferensial dalam pelaksanaan PPG, di mana modul pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta berdasarkan asesmen kompetensi awal. Pre-assessment ini seharusnya menjadi dasar untuk menentukan jalur pelatihan yang paling efektif bagi setiap guru, sehingga setiap peserta mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan efektif (L. Shulman, 1986).

Tantangan ketiga berkaitan dengan integrasi pembelajaran berbasis teknologi. Revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap pendidikan secara fundamental, menuntut guru tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki literasi digital untuk memanfaatkan platform pembelajaran online, LMS, atau media digital lain yang mendukung proses pembelajaran. Penelitian oleh Samsu et al. menekankan bahwa pemanfaatan LMS dalam PPG memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru madrasah, namun akses yang tidak merata dan kesiapan peserta menjadi kendala utama (SamsuSyahbani et al., 2026). Guru yang belum familiar dengan teknologi digital cenderung kesulitan mengikuti proses pembelajaran daring, sehingga efektivitas program menjadi terhambat.

Selain teknologi, tantangan keempat adalah relevansi materi PPG dengan praktik profesional di lapangan. Studi evaluatif menunjukkan bahwa meskipun guru mengikuti program dengan sukses dan memperoleh sertifikasi, kompetensi yang mereka peroleh tidak selalu mampu diterapkan secara efektif dalam konteks pembelajaran sehari-hari (Yasinta Qur'aini Nurdiniyya¹, 2025). Hal ini sering terjadi karena materi PPG terlalu generik dan kurang menekankan pengembangan strategi pembelajaran yang kontekstual, sehingga guru kesulitan menyesuaikan teori yang dipelajari dengan kebutuhan nyata di sekolah atau madrasah. Relevansi materi menjadi kunci efektivitas program, karena tujuan utama PPG adalah menyiapkan guru yang profesional dan siap menghadapi dinamika pendidikan.

Tantangan kelima terkait dengan motivasi peserta. PPG sering kali dipandang sebagai syarat administratif untuk mendapatkan tunjangan atau kenaikan jabatan, sehingga sebagian guru termotivasi oleh insentif eksternal daripada peningkatan kompetensi intrinsik (Ryan & Deci, 2000). Fenomena ini dapat menurunkan efektivitas program, karena peserta lebih fokus pada kelulusan atau sertifikasi formal daripada pengembangan kemampuan profesional yang berkelanjutan. Motivasi intrinsik sangat penting untuk menjamin bahwa kompetensi yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam praktik pembelajaran, bukan hanya menjadi formalitas administratif (Darling-Hammond, 2017).

Di sisi lain, evaluasi efektivitas PPG Kemenag menunjukkan beberapa keberhasilan signifikan. Program ini berhasil menjangkau ribuan guru di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan keterbatasan akses pelatihan profesional. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional peserta, meskipun variasi hasil masih terlihat antara satu wilayah dengan wilayah lain (Kemenag, 2025). Selain itu, PPG juga mendorong guru untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kepribadian yang lebih baik, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan dalam kelas, serta etika profesional. Dampak ini menunjukkan bahwa program memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas guru, asalkan tantangan pelaksanaan dapat dikelola secara efektif.

Untuk mengoptimalkan efektivitas PPG, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, penyusunan modul pembelajaran berbasis asesmen kompetensi awal memungkinkan diferensiasi materi sesuai kebutuhan peserta. Guru dengan kompetensi dasar rendah dapat fokus pada penguatan pedagogik dan profesional, sedangkan guru dengan kompetensi lebih tinggi diarahkan pada pengembangan keahlian lanjutan dan inovasi pembelajaran. Kedua, peningkatan dukungan teknologi dan literasi digital menjadi penting untuk menjamin semua peserta mampu mengikuti program dengan maksimal, terutama di daerah terpencil (Teräs, 2022). Ketiga, motivasi peserta harus diarahkan pada peningkatan profesionalisme intrinsik melalui penekanan pada manfaat jangka panjang bagi praktik pembelajaran, bukan hanya sebagai sarana administratif untuk mendapatkan tunjangan atau jabatan (Opfer & Pedder, 2011).

Selain itu, integrasi antara PPG dan sistem karier guru menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa profesionalisme yang dikembangkan dalam program dapat diterapkan dalam praktik nyata. Guru yang menunjukkan peningkatan kompetensi melalui PPG harus mendapat pengakuan dan insentif yang sesuai, baik dalam bentuk kenaikan jabatan, tunjangan, maupun kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan. Pendekatan ini akan menciptakan siklus positif: guru termotivasi untuk belajar, kompetensi meningkat, kualitas

pembelajaran di kelas meningkat, dan pada akhirnya pendidikan Islam di sekolah menjadi lebih efektif (“Improv. Sch. Leadersh.,” 2010).

Namun demikian, efektivitas PPG Kemenag tetap menghadapi problem struktural yang kompleks. Misalnya, kesenjangan sumber daya antar wilayah, variasi kualitas penyelenggara program, serta integrasi materi pembelajaran dengan kurikulum nasional dan lokal masih menjadi masalah yang perlu perhatian serius. Kesenjangan akses ini, jika tidak diatasi, dapat memperburuk ketimpangan kualitas guru antar daerah, yang pada akhirnya berdampak pada mutu pendidikan Islam secara nasional (Hanun, 2021). Oleh karena itu, kebijakan PPG perlu lebih sistemik, berbasis data, dan memperhitungkan konteks lokal peserta agar program dapat benar-benar menjawab kebutuhan profesionalisme guru di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, PPG Kemenag merupakan program yang strategis dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas guru profesional. Efektivitasnya ditentukan oleh berbagai faktor: relevansi materi dengan praktik di lapangan, kesiapan peserta, motivasi intrinsik, penguasaan teknologi, serta integrasi dengan sistem karier guru. Tantangan yang muncul tidak dapat diabaikan, tetapi dengan strategi diferensial, penyesuaian materi, dukungan teknologi, dan penguatan motivasi profesional, PPG dapat menjadi alat transformasi pendidikan Islam yang signifikan, menjawab kebutuhan guru profesional, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis fokus penelitian, Program PPG Masal di bawah Kementerian Agama terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi guru di bidang pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Program ini berhasil menjangkau ribuan guru dari berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, serta memberikan pelatihan yang memperkuat keterampilan mengajar, pemahaman materi, dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pendidikan abad ke-21. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan kompetensi guru secara signifikan, sementara integrasi pembelajaran berbasis teknologi dan modul pembelajaran yang kontekstual memberikan dukungan bagi guru untuk menerapkan praktik profesional secara lebih efektif di kelas.

Namun, efektivitas program masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti disparitas kesiapan peserta, variasi kualitas penyelenggaraan, motivasi peserta yang kadang lebih bersifat administratif, serta kesenjangan akses teknologi di beberapa wilayah. Kendala-kendala ini mengindikasikan perlunya strategi diferensial berbasis asesmen kompetensi awal, peningkatan

literasi digital, dan penguatan integrasi PPG dengan sistem karier guru. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, PPG Masal berpotensi menjadi mekanisme yang efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan guru profesional, memperkuat kualitas pendidikan, dan menjawab tantangan kompleks dalam sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Arroyan, M. (2024). Reformasi Pendidikan: Integrasi Nilai-Nilai Tradisionalisme dan Modernisme dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 2024.
- Brown, H. D. (2001). (2001). Teaching by Principles Douglas Brown. *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy (2nd Ed.)*. New York: Longman.
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European Journal of Teacher Education*, 40(3). <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>
- Darling-Hammond, L., & McCloskey, L. (2008). Assessment for learning around the world what would it mean to be internationally competitive? *Phi Delta Kappan*, 90(4). <https://doi.org/10.1177/003172170809000407>
- Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (2001). Extrinsic rewards and intrinsic motivation in education: Reconsidered once again. In *Review of Educational Research* (Vol. 71, Number 1). <https://doi.org/10.3102/00346543071001001>
- Fisip Unpar. (2015). Daftar isi Daftar isi Daftar isi. *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun, II(1)*, 17–18.
- Goleman, D. (1995). (1995). Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam Books. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11).
- Hanun, F. (2021). Implementasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Serang Banten. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(3). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i3.1158>
- Improving School Leadership. (2010). In *Improving School Leadership*. <https://doi.org/10.1787/9789264082915-et>
- Kemenag, 2025. (2025). KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Kementerian Agama RI. (2026). *Laporan Pelaksanaan PPG Batch 4*. Biro Pendidikan.
- Kinanthi, G. S., Saputri, N. F., & Rosita, N. A. (2024). Pentingnya Pengembangan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menghadapi Transformasi Pendidikan Abad 21. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91652>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & S. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 36(1).
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, L. J Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

- Rosdakarya. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Nasr, S. H. (1976). *Islamic Science: An Illustrated Study*. World of Islam Festival Publishing Company.
- Neil Selwyn. (2021). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury.
- Opfer, V. D., & Pedder, D. (2011). The lost promise of teacher professional development in England. *European Journal of Teacher Education*, 34(1). <https://doi.org/10.1080/02619768.2010.534131>
- Pemerintah RI. (2005). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Produk Hukum*.
- Pendidikan Profesi Guru No. 19 2024, Pub. L. 19 (2024).
- RISTEKDIKTI. (2017). Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru. *PEDOMAN PPG*.
- Rohman, Moh Mujibur, and Siti Muafatun. "Modernisasi Pendidikan Islam (Sebuah Studi Analisis Model Pendidikan Islam Perspektif Fadzlor Rahman)." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 18.2 (2022): 109-124.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Historical Approach and Philological Approach as Methodological Reasoning in the Study of the al-Quran (A Conceptual Study): Historical Approach dan Philological Approach sebagai Nalar Metodologis dalam Kajian Studi al-Quran (Sebuah Telaah Konseptual)." *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin* 1.2 (2024): 94-115.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.
- Rohman, Moh Mujibur. "Strategi Baru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pesantren di Era Soccity 5.0." *Bidayah: Studi Ilmu-ilmu Keislaman* (2023): 258-270.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>
- SamsuSyahbani, N., Rahman, M. Z., Islam, U., Sulthan, N., Saifuddin, T., Artikel, I., Mandiri, P., Madrasah, K. G., Pedagogik, K., & Education, J. (2026). *EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MANDIRI BERBASIS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) PADA PROGRAM PPG DALAM*. 14(1), 639–645.
- Shulman, L. (1986). Those who understand Knowledge Growth in Teaching Educational Researcher. *Educational Researcher*, 15(02).
- Shulman, L. S. (2019). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Profesorado*, 23(3). <https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i3.11230>
- Sridadi, S., Sukarno, S., Septiasari, E. A., & Hartanto, D. D. (2023). Evaluasi pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan di Universitas Negeri Yogyakarta pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 19(2). <https://doi.org/10.21831/jpji.v19i2.73795>
- Teräs, M. (2022). Education and technology: Key issues and debates. *International Review of Education*, 68(4), 635–636. <https://doi.org/10.1007/s11159-022-09971-9>

- UNESCO. (2018). UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (Version 3). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Number 9).
- Weyant, E. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition. *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*, 19(1–2). <https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231>
- Yari Dwikurnaningsih¹, Marinu Waruwu, Sapto Irawan, & Sophia Tri Satyawati. (2025). The Effectiveness of the Online Professional Teacher Education (PPG) Program in Improving Teacher Professionalism. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 8(1), 109–118. <https://doi.org/10.23887/jlls.v8i1.77875>
- Yasinta Qur'aini Nurdiniyya¹, A. R. M. I. B. (2025). *Manajemen Pelaksanaan Program Ppg Dan Tpg Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Pada Jenjang Pendidikan Menengah Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur*. 10(September), 217–232.